

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana: Studi Program “Desa Tangguh Bencana” di Desa Panimbangjaya, Kabupaten Pandeglang

Siti Humaeroh

Universitas Mathla’ul Anwar

Korespondensi Email: sitihumaeroh@unmabanten.ac.id

Abstract

Desa Tangguh Bencana (Destana) is a community-based national policy aimed at strengthening preparedness in facing disaster risks. This study aims to evaluate the implementation of Destana in Panimbangjaya Village, located in Pandeglang Regency. Panimbangjaya is one of the villages on the southern coast of Pandeglang Regency that is highly vulnerable to hydrometeorological disasters. The proximity of the Indo-Australian and Eurasian tectonic plates makes this region frequently affected by earthquakes. This condition makes the Disaster-Resilient Village Program (Destana) critically important as the first line of mitigation for thousands of residents in the area. This research employs a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews and documentation. The findings indicate that the training and outreach activities under the Destana program have improved the community’s understanding of disaster mitigation. However, limited funding, inadequate evacuation infrastructure, and low community participation remain major challenges. A lack of village fund allocation and dependence on external facilitators also constrain the program’s sustainability. The study recommends implementing integrated educational programs involving formal educational institutions and community organizations, improving infrastructure to facilitate evacuation mobility, and promoting local economic empowerment as a comprehensive approach to building sustainable village resilience. Overall, the program has shown results, particularly in increasing public knowledge on disaster preparedness, but technical issues such as budgeting remain serious challenges.

Keywords: *Policy evaluation, disaster, Destana, preparedness, resilient village.*

Abstrak

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan kebijakan nasional berbasis masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Destana di Desa Panimbangjaya, Kabupaten Pandeglang. Desa Panimbangjaya merupakan salah satu desa di pesisir selatan Kabupaten Pandeglang yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia dekat wilayah tersebut membuat daerah ini sering dilanda gempa. Keadaa ini membuat Program Desa Tangguh Bencana (Destana) menjadi sangat penting sebagai mitigasi pertama bagi ribuan penduduk di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa pelatihan dan sosialisasi dalam program Destana telah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana. Namun, keterbatasan dana, infrastruktur evakuasi yang belum memadai, dan

rendahnya partisipasi warga menjadi kendala utama. Kurangnya alokasi dana desa dan ketergantungan pada fasilitator eksternal juga membatasi keberlanjutan program. Studi ini merekomendasikan program edukasi yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan formal dan lembaga kemasyarakatan, perbaikan infrastruktur juga perlu ditingkatkan untuk mempermudah mobilitas evakuasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai pendekatan komprehensif untuk membangun ketangguhan desa secara berkelanjutan. Secara keseluruhan program ini telah memperlihatkan hasil terutama pada aspek pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, namun di sisi lain beberapa hal teknis seperti anggaran masih menjadi tantangan serius.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, bencana, Destana, kesiapsiagaan, desa tangguh

Pendahuluan

Kebijakan untuk menanggulangi bencana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan negara terhadap warganya dari risiko bencana melalui pendekatan menyeluruh yang meliputi mencegah, memitigasi, siap siaga, tanggap darurat, hingga pemulihan (BPK RI, 2007). Di dalam kerangka regulasi tersebut, masyarakat ditempatkan sebagai yang paling utama yang punya peran penting dalam membangun ketangguhan terhadap bencana. Untuk mendukung implementasi kebijakan berbasis masyarakat, pemerintah menginisiasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana), yang secara operasional diatur melalui aturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengenali potensi bencana, merespons secara cepat dan tepat, serta memulihkan kondisi pasca bencana secara mandiri.

Program Destana juga merupakan bagian dari kebijakan nasional yang didorong hingga ke tingkat daerah melalui peran aktif pemerintah provinsi dan kabupaten. Di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, program ini mulai diperkenalkan secara bertahap pada desa-desa dengan tingkat kerawanan bencana tinggi. Salah satu desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program adalah Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang. Wilayah ini tergolong rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan gelombang pasang, sehingga penguatan kapasitas masyarakat melalui Destana menjadi sorotan utama.

Secara administratif, Desa Panimbangjaya telah menjalankan program ini sebagai bagian dari perencanaan pembangunan desa dan didukung oleh kebijakan daerah. Dalam konteks kebijakan daerah tersebut, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa perlindungan merupakan serangkaian upaya, baik dalam bentuk mencegah maupun menangani, yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi para masyarakat pesisir serta penduduk pulau-pulau kecil dalam menjalankan kegiatan usaha (Peraturan Daerah Provinsi Banten). Ketentuan ini mempertegas

komitmen pemerintah daerah dalam mendukung ketangguhan wilayah pesisir melalui program-program yang relevan, seperti Destana.

Namun yang menjadikan Program Destana ini menarik untuk dievaluasi selain program ini sudah dijalankan sehingga perlu diukur adalah terdapatnya situasi rentan bencana yang semakin mengkhawatirkan di Wilayah Pandeglang. Sehingga hasil dari program yang sudah berjalan ini perlu dilihat secara lebih jernih untuk mencapai tujuannya membentuk Desa Tangguh Bencana. Pada sisi lain peneliti melihat bahwa program ini tidak dapat lepas dari keterlibatan pihak-pihak terkait seperti BPBD, fasilitator dan penyuluh kebencanaan, mengingat pemerintah desa tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan program ini seorang diri.⁶ Sehingga hambatan dan tantangan yang mungkin merintang Program ini perlu dievaluasi dengan pendekatan yang komprehensif.

Sebagai pijakan akademik, penelitian ini juga merujuk pada beberapa hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan untuk mempertegas posisi kajian ini serta menjelaskan novelty yang hendak disampaikan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Nur Ayu (2020) mengungkapkan bahwa terkait bencana, tingkat kesiapsiagaan mereka masih terbilang rendah. Ini dikarenakan terbatasnya pelatihan simulasi bencana dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pembangunan rumah tahan bencana (Nur Ayu, 2020).

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Kartika Purwaningtyas yang berusaha mengkaji evaluasi Desa Tangguh Bencana pada perspektif yang lebih spesifik yakni Perspektif Formatif dan Reflektif Ketangguhan Masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa pada indikator terkait modal sosial dalam hal ini seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dalam skala normatif atau sebagai faktor yang membentuk adanya ketangguhan masyarakat dalam Desa Tangguh Bencana. Selanjutnya instrumen hasil dalam Desa Tangguh Bencana di antaranya sistem peringatan dini, peta dan analisis risiko serta mitigasi struktural sebagai indikator petunjuk atau reflektif yang menggambarkan bagaimana ketangguhan masyarakat dalam menghadapi kondisi bencana di kemudian hari.

Senada dengan dua riset sebelumnya, Dellarizki Prameisa dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana belum mencapai tujuan dengan efektif dikarenakan masih terdapat masyarakat serta karang taruna yang belum terlibat secara aktif terhadap pentingnya pengelolaan bencana, selain itu kurangnya kapasitas dari tim relawan sehingga program tersebut belum mampu dikatakan tangguh karena masih adanya kekurangan pada program desa tangguh bencana tersebut.

Dari banyak hasil studi menunjukkan bahwa Destana masih menemui sejumlah hambatan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Panimbangjaya menjadi penting untuk menilai sejauh mana pendekatan yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Evaluasi ini juga bertujuan untuk

mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan ke depan guna memperkuat ketangguhan desa secara substantif di wilayah yang rawan bencana. Berangkat dari masalah dan hasil kajian sebelumnya maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana evaluasi program Destana di Desa Panimbangjaya dilihat dari dimensi proses dan hasil?

Pada aspek teoritis penelitian ini meminjam konsep *Disaster Logic Model* (DLM), merupakan kerangka konseptual yang dirancang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi dalam konteks penanggulangan bencana secara sistematis.

Model ini mengadopsi pendekatan *logic model* tradisional namun disesuaikan dengan kompleksitas dan dinamika penanggulangan bencana, termasuk fase kesiapsiagaan (*preparedness*), tanggap darurat (*response*), pemulihan (*recovery*), dan pengurangan risiko (*mitigation*). DLM memetakan hubungan antara sumber daya (input), aktivitas, output, outcome, dan dampak dalam konteks krisis atau bencana, memungkinkan para evaluator mengidentifikasi dengan jelas apa yang bekerja, untuk siapa, dalam kondisi seperti apa, dan mengapa.

Pada konteks program seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), model ini sangat bermanfaat untuk menilai efektivitas pelatihan kesiapsiagaan, pembangunan infrastruktur evakuasi, serta penguatan kapasitas lokal. Dengan menggunakan DLM, evaluasi tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada logika kausal di balik setiap intervensi, termasuk konteks sosial, kelembagaan, dan geografis yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. DLM juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan adaptabilitas program di tengah risiko bencana yang terus berkembang. Seperti dijelaskan oleh McEntire (2007), penggunaan kerangka logika dalam penanggulangan bencana membantu mengintegrasikan perspektif multidisiplin, menyelaraskan tujuan jangka pendek dan panjang, serta meningkatkan akuntabilitas dalam kebijakan kebencanaan (McEntire, David A, 2007).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Panimbangjaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti perangkat desa, masyarakat, dan lembaga terkait seperti BPBD serta melalui dokumentasi terhadap regulasi, laporan kegiatan, dan arsip desa terkait program Destana. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara reduksi data, yaitu menyaring informasi yang relevan sesuai fokus penelitian, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk narasi tematik untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara induktif, di mana pola, makna, dan hubungan antar data diinterpretasikan berdasarkan konteks lokal dan dinamika program di lapangan, sehingga menghasilkan gambaran utuh dan objektif tentang efektivitas serta tantangan implementasi Destana di wilayah tersebut.

Hasil dan Diskusi

Realitas Pelaksanaan Destana di Desa Panimbang Jaya

Berdasarkan perolehan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Desa Panimbangjaya, Kab. Pandeglang, diketahui bahwa Program Desa Tangguh Bencana (Destana) mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang didanai melalui RMC dan fasilitator daerah. Pemerintah desa hanya bertindak sebagai pelaksana kegiatan, tanpa alokasi dana secara langsung. Narasumber menjelaskan bahwa, “desa hanya sebatas boleh dikata pelakunya aja ya, objek-objek lah. Tapi desa itu orang kedua yang menerima dana. Ini kan pemerintah terus menerima. Kita nggak menerima dana.” Dana dan fasilitas kegiatan dikelola langsung oleh pihak provinsi dan kabupaten, sedangkan desa hanya menyediakan peserta.

Jika ditinjau melalui pendekatan Disaster Logic Model (DLM), posisi desa sebagai pelaksana tanpa peran dalam proses perencanaan dan penganggaran menunjukkan lemahnya struktur kelembagaan lokal dalam siklus manajemen risiko bencana. Dalam kerangka DLM, penanggulangan bencana yang efektif membutuhkan integrasi antara input, process, output, outcome, dan impact secara berkesinambungan dan partisipatif (Suharyo, 2020). Namun, dalam praktik di Panimbangjaya, input berupa dana dan perencanaan tidak disalurkan melalui kewenangan desa, sehingga proses implementasi cenderung top-down dan tidak memperkuat kapasitas kelembagaan lokal. Hal ini sejalan dengan temuan Ardhana et al. (2021) yang menyatakan bahwa ketidakterlibatan desa dalam tahap perencanaan dan pembiayaan membuat program Destana tidak dapat bertransformasi menjadi gerakan masyarakat yang berkelanjutan.

Selama program berlangsung, telah dilaksanakan sebanyak 30 kali pertemuan yang berisi pelatihan mitigasi bencana, pengenalan risiko, serta simulasi penanganan darurat. Narasumber menyatakan bahwa kegiatan tersebut membawa manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam memahami langkah evakuasi dini. “Manfaatnya yang jelas kita jadi tahu terkait apa sih itu bencana, kemudian ciri-cirinya gimana, kemudian mitigasinya gimana, terus bagaimana cara mengevakuasinya. Jadi minimal kita dan keluarga itu jadi tahu.” Dalam perspektif DLM, kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari tahapan output yang seharusnya mampu menciptakan outcome berupa peningkatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di masyarakat (Rahmawati, 2018). Namun, agar pelatihan tidak berhenti sebagai formalitas kegiatan, dibutuhkan feedback loop yang menghubungkan hasil pelatihan dengan kebijakan desa dan pembelajaran institusional.

Sosialisasi juga telah dilakukan di beberapa sekolah seperti SDN dan MAN, meskipun tidak berjalan secara rutin. “Kita adakan sosialisasi di SD juga ada di MAN, kemudian di lingkungan itu ada kegiatan sosialisasinya. Jadi kemarin di SDN 3 itu kita koordinasi dengan kepala sekolahnya, kemudian kita adakan edukasi terkait dengan masalah bencana, termasuk simulasinya juga,” ujar narasumber. DLM menekankan pentingnya multi-stakeholder involvement dalam semua tahapan logika

penanggulangan bencana. Sekolah sebagai institusi sosial yang dekat dengan masyarakat perlu difungsikan sebagai simpul edukasi kebencanaan secara berkelanjutan, tidak hanya dalam momen proyek semata (Munandar, 2021). Namun kelemahan koordinasi dan tidak adanya alokasi reguler untuk program ini menyebabkan keberlanjutan pelatihan sulit dipertahankan.

Namun demikian, keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan utama. Jalur evakuasi yang belum layak membuat masyarakat kesulitan saat terjadi kondisi darurat. “Ketika masyarakat terjadi bencana, hanya jalan utama yang di pasar. Otomatis yang lewat itu ada dari kecamatan lain juga yang dekat sama lokasi bencana. Itu kan ada satu titik jalannya. Ketika hanya satu jalur doang... yang ada malah pembunuhan massal karena akses jalannya hanya satu titik,” ungkapnya. DLM mengajarkan bahwa impact dari kebijakan penanggulangan bencana sangat bergantung pada keandalan sistem dukungan infrastruktur yang dibangun sejak awal. Tanpa dukungan infrastruktur evakuasi yang memadai, maka output berupa pelatihan dan sosialisasi tidak akan berdampak signifikan dalam situasi nyata.

Narasumber juga menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada pengalokasian dana desa untuk mendukung Destana karena adanya keterbatasan anggaran dan prioritas lain seperti bantuan langsung tunai. Ia menyebutkan, “Untuk hal-hal seperti ini kita terbentur dengan masalah aturan yang ada di Pergub. Untuk infrastruktur saja yang kita butuhkan itu belum semua tercukupi, apalagi untuk yang sifatnya pencegahan.” Dalam kerangka DLM, kelemahan alokasi anggaran ini menunjukkan belum adanya linkage antara prioritas pembangunan desa dan kebijakan penanggulangan risiko bencana. Akibatnya, meski program pelatihan telah dilakukan, namun tidak bertransformasi menjadi perubahan sistemik dan berkelanjutan karena tidak didukung oleh input berupa kebijakan dan anggaran yang memadai (Suharyo, 2020).

Evaluasi Program Destana: Capaian dan Hambatan

Evaluasi terhadap implementasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Panimbangjaya menunjukkan adanya kemajuan pada fase mitigasi dan kesiapsiagaan, dua tahap awal dalam kerangka Disaster Lifecycle Management (DLM) yang dikembangkan oleh Haddow et al. (2020). Hal ini terlihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai risiko bencana, yang tercermin dari mayoritas responden yang menyatakan lebih paham mengenai tindakan mitigasi. Keberhasilan ini sejalan dengan tujuan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana, tidak semata sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek yang mampu mengelola risiko secara mandiri.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan kelemahan yang cukup serius pada fase kesiapsiagaan struktural, terutama terkait minimnya infrastruktur pendukung seperti jalur evakuasi permanen dan fasilitas pendukung evakuasi lainnya. Dalam perspektif DLM, keberhasilan mitigasi pengetahuan harus dilanjutkan dengan kesiapan sistemik,

agar masyarakat tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki sarana untuk melakukannya. Sayangnya, simulasi evakuasi yang dilakukan hanya bersifat seremonial dan tidak terintegrasi dalam sistem pelatihan rutin. Temuan Ajeng Nur Ayu (2020) menegaskan bahwa pemahaman semata tidak cukup apabila tidak disertai dukungan infrastruktur yang memadai. Artinya, fase preparedness belum tuntas secara struktural.

Dari sisi tata kelola, kendala pendanaan menjadi isu dominan yang memperlemah keberlanjutan program ini. Ketiadaan alokasi dana desa untuk program Destana membuat pemerintah desa kehilangan daya dorong untuk mengambil inisiatif. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendekatan desentralisasi menuntut agar desa juga memiliki otonomi untuk merancang dan mengimplementasikan program penanggulangan bencana secara kontekstual. Dalam konteks DLM, hal ini menghambat transisi dari fase kesiapsiagaan menuju respons dan recovery yang bersifat lokal dan cepat tanggap. Tanpa fleksibilitas fiskal, respons terhadap bencana akan tetap top-down dan tidak adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Aspek resiliensi sosial juga menjadi titik evaluasi penting. Tingginya tingkat kemiskinan ekstrem di Desa Panimbangjaya membuat masyarakat tetap berada dalam situasi rawan bencana, karena daya tahan ekonomi mereka sangat lemah. Jika dikaitkan dengan teori DLM, maka tahap recovery tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya penguatan ekonomi sebagai bagian dari pemulihan pasca-bencana. Seharusnya program Destana dapat dirancang agar tidak hanya memberikan edukasi kebencanaan, tetapi juga terintegrasi dengan pelatihan ekonomi produktif. Menurut penelitian Rahman et al. (2021), keberhasilan program pengurangan risiko bencana di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya ekonomi masyarakat yang memadai.

Secara garis besar, pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Panimbangjaya menunjukkan capaian positif dalam aspek peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana, sebagaimana ditunjukkan oleh responden yang mengaku lebih siap dalam menghadapi risiko bencana setelah mengikuti edukasi dan pelatihan. Namun, keberhasilan ini masih bersifat parsial karena tidak diimbangi dengan kesiapsiagaan struktural dan kelembagaan yang memadai. Hambatan utama terletak pada keterbatasan alokasi anggaran desa yang tidak secara khusus mendanai program Destana, serta minimnya infrastruktur pendukung seperti jalur evakuasi permanen. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam simulasi dan kegiatan lanjutan masih rendah, sementara aspek pemberdayaan ekonomi yang dapat memperkuat ketangguhan sosial belum menjadi bagian integral dari pelaksanaan program. Hal ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada dukungan lintas sektor dan adanya kebijakan afirmatif yang mengintegrasikan aspek edukatif, struktural, dan ekonomi dalam membangun ketangguhan masyarakat.

Dengan demikian, evaluasi atas pelaksanaan Destana menunjukkan bahwa program ini telah berhasil pada aspek awareness building dan penguatan partisipasi

sosial, tetapi masih lemah dalam aspek infrastruktur kesiapsiagaan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam perspektif DLM, siklus kebencanaan akan terus berulang tanpa peningkatan kualitas di setiap fasenya. Oleh karena itu, pendekatan integratif yang menggabungkan edukasi, penguatan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi menjadi keharusan jika ketangguhan desa ingin benar-benar terbangun secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Panimbangjaya telah memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana. Namun, program ini masih menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan infrastruktur evakuasi, minimnya alokasi dana dari pemerintah desa, dan partisipasi warga yang belum optimal. Evaluasi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Destana masih bersifat top-down, dengan keterlibatan pemerintah desa yang terbatas pada pelaksanaan teknis. Selain itu penelitian ini juga menawarkan beberapa rekomendasi diantaranya perlu adanya penguatan kelembagaan dan otonomi fiskal desa dalam pengelolaan program Destana melalui regulasi yang mendukung penggunaan dana desa untuk kesiapsiagaan bencana. Kedua, pembangunan jalur evakuasi dan sarana pendukung perlu diprioritaskan agar respons darurat dapat dilakukan secara efektif. Ketiga, pendekatan edukatif harus dilengkapi dengan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat guna memastikan ketangguhan yang berkelanjutan. Terakhir, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Ucapan Terimakasih

penulis mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah dan Masyarakat Desa Panimbangjaya, BPBD Kabupaten Pandeglang, dan pihak lainnya yang membantu berjalannya penelitian ini dengan lancar. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mathla'ul Anwar yang telah membantu penulis pada aspek dukungan teknis dan pendanaan dalam penelitian ini.

Referensi

- Ajeng Nur Ayu. (2020). Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana: Studi di Wilayah Rawan Longsor di Jawa Barat. *Jurnal Sositologi*, 19(3), 211–220.
- Ardhana, M., Puspitasari, M. A., & Hermawan, E. (2021). Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dalam Perspektif Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 121–134.
- Ayu, Ajeng Nur. (2020). Tingkat kesiapsiagaan masyarakat berbasis mitigasi bencana di Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten. Skripsi, Universitas Trisakti.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2012). Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, pp. 1–47.

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten. (2022). "Destana untuk Masyarakat Tangguh Bencana." 27 September 2022. <https://bpbd.bantenprov.go.id/portal/articles/read/destana-untuk-masyarakat-tangguh-bencana>
- Birnbaum, M. L., Daily, E. K., O'Rourke, A. P., & Kushner, J. (2016). Research and evaluations of the health aspects of disasters, part VI: interventional research and the Disaster Logic Model. *Prehospital and Disaster Medicine*.
- BPK RI. (2007). UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pp. 1-50.
- BPK RI. (2018). Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pp. 1-22.
- Damayanti, A. (2021). Desentralisasi Penanggulangan Bencana: Studi Evaluatif atas Otonomi Pemerintah Desa dalam Mengelola Risiko Bencana. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 145-160.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). (2024). "Bangun Desa Tangguh Bencana, FHUI Rancang Peraturan Desa Tunggal Jaya Pandeglang." *Humas FHUI*, 6 Desember 2024. <https://law.ui.ac.id/bangun-desa-tangguh-bencana-fhui-rancang-peraturan-desa-tunggal-jaya-pandeglang/>
- Indrawan, R. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Tangguh Bencana. *Jurnal Mitigasi dan Adaptasi Kebencanaan*, 2(1), 32-44.
- Juhad, F. (2024). Barriers in the Implementation of Community Based Disaster Management in Indonesia. *International Journal of Educational Technology Research*.
- Kneale, D., Bangpan, M., & Thomas, J. (2022). Using logic models in research and evaluation of Health EDRM interventions. *WHO Guidance*.
- McEntire, D. A. (2007). Disaster Logic Model framework for evaluating disaster interventions. *SSRN*.
- Munandar, A. (2021). Peran Sekolah dalam Pengurangan Risiko Bencana: Studi pada Implementasi Program Sekolah Siaga Bencana di Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(1), 55-70.
- Nazara, L. et al. (2024). Overview of DESTANA Initiation in Panusupan, Central Java. *E3S Web of Conferences*.
- Ningsih, T. (2019). Ketahanan Ekonomi sebagai Fondasi Ketangguhan Bencana di Tingkat Komunitas. *Jurnal Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Pembangunan*, 6(1), 90-102.
- Prameisa, Dellarizki. (2018). Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk Penanggulangan Banjir (Studi pada Desa Sirnobojo, Kabupaten Pacitan). *Skripsi, Universitas Brawijaya*.
- Purwaningtyas, Kartika. (2021). Evaluasi Desa Tangguh Bencana dalam Perspektif Formatif dan Reflektif Ketangguhan Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1). <https://doi.org/10.37064/jpm.v9i1.8872>
- Rahmawati, S. (2018). Pelatihan Mitigasi sebagai Strategi Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(3), 213-227.
- Sembiring, Tamaulina Br, et al. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Saba Jaya Publisher.

- Siahaan, A. et al. (2025). Analysis of Community Preparedness Following Destana Establishment in Situmeang Hasundutan Village, North Tapanuli Regency. OAHSJ.
- SSRN Authors. (2025). Towards Resilient Communities: First Evidence of Adopting Destana Standard.
- Suharyo, W. I. (2020). Model Logika Bencana dalam Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas. *Jurnal Manajemen Bencana Indonesia*, 2(1), 45–58.